

**PENGAWASAN SISTEM TRANSPORTASI LAUT UNTUK KE DAERAH
DESTINASI WISATA DI KOTA TANJUNGPINANG
(Studi Keamanan Transportasi Wisatawan Ke Pulau Penyengat)**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh:

**IRA MONICA
NIM : 120563201152**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2017**

ABSTRAK

Tanjungpinang merupakan wilayah destinasi wisata antar pulau, selama ini pemerintah khususnya Dinas Perhubungan kurang memperhatikan sarana dan prasarana pariwisata seperti transportasi antar-pulau. Fenomena yang belakangan ini terjadi yaitu tenggelamnya pompong di sekitar perairan Pulau Penyengat yang merupakan destinasi wisata di Kota Tanjungpinang dikarenakan tidak adanya standarisasi pompong dan tidak adanya alat keselamatan yang memadai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengawasan Sistem Transportasi Laut Untuk Ke Daerah Destinasi Wisata Di Kota Tanjungpinang Dalam Keamanan Transportasi Wisatawan Ke Pulau Penyengat.

Dalam penelitian ini jumlah informan adalah dua orang pegawai Dinas Perhubungan bagian Transportasi Laut. Kemudian dua orang pegawai KSOP, tekong pompong berjumlah dua orang, satu orang pihak asuransi, satu orang Pol Air dan tiga orang masyarakat sehingga penelitian ini memiliki jumlah informan sebelas orang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan terlebih dahulu mendeskripsikan, memverifikasi, menginterpretasikan untuk kemudian di analisis sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

Hasil penelitian secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Menetapkan alat ukur (*standard*) di lapangan tidak memiliki kesamaan dengan data yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, dari 62 pompong yang beroperasi, hanya 24 pompong yang terdata dan dianggap layak untuk beroperasi, sehingga ada sekitar 38 pompong yang belum masuk dalam pendataan karena belum memenuhi standar namun bisa beroperasi. 2. Mengadakan penilaian (*evaluate*) ditemukan bahwa instansi terkait melakukan penilaian dilapangan seperti pemakaian *life jacket*. Namun, untuk kepemilikan surat izin pompong, masih banyak pompong yang tidak bersertifikat tetapi dapat beroperasi secara bebas. 3. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*) tindakan perbaikan memang sudah dilakukan walaupun dirasakan masyarakat belum optimal karena masih banyak yang tidak sesuai dengan standarisasinya, masih banyak pompong yang beroperasi tidak dilengkapi dengan alat - alat keselamatan yang layak.

Kesimpulan dalam penelitian mengenai Pengawasan Sistem Transportasi laut Untuk Ke Daerah Destinasi Wisata Di Kota Tanjungpinang belum dilakukan secara optimal, walaupun saat ini tindakan perbaikan memang sudah ada seperti tersedianya *life jacket*, namun keadaannya banyak yang rusak. Untuk kedepannya diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam transportasi laut sebaiknya mengoptimalkan pengawasan dari pelaksanaan peraturan yang telah di buat, sehingga dapat meminimalisir kecelakaan di tengah laut.

Kata Kunci : Pengawasan, Destinasi Wisata, Transportasi

ABSTRACT

Tanjungpinang is an inter-island tourist destination area, so far the government, especially the Transportation Department, has less attention to tourism facilities and infrastructure such as inter-island transportation. The recent phenomenon that occurs is the sinking of pompong around the waters of Penyengat Island which is a tourist destination in Tanjungpinang City due to the lack of standardization of pompong and the absence of adequate safety tools. The purpose of this research is to know the monitoring of sea transportation system to the area of tourist destination in Tanjungpinang city in the security of tourist transport to the island of Penyengat.

In this research, the number of informants is two employees of Transportation Department of Sea Transportation. Then two KSOP employees, two people pompong tekong, one insurer, a Water Pol and three people so that this study has the number of informants eleven people. Analysis of data used in this research is to do first describe, verify, interpret to then in the analysis so as to obtain a conclusion.

The results of the detailed study can be described as follows: 1. Establish the measuring tools (standard) obtained in the field does not have in common with the data owned by the Department of Transportation, of 62 pompong that operate, only 24 pompong recorded and considered feasible to operate, so There are about 38 pompong that have not been included in the data collection because it has not met the standard but can operate. 2. Conducting an assessment (evaluate) found that the relevant agencies to conduct assessments in the field such as life jacket usage. However, for ownership of pompong licenses, many pompong are not certified but can operate freely. 3. Conducting corrective action measures of corrective action have been done although the public felt not optimal because there are still many that are not in accordance with the standardization, there are still many pompong that operate is not equipped with appropriate safety tools.

Conclusions in the study of Marine Transportation System Supervision To Tourism Destination Region In Tanjungpinang City has not been done optimally, although currently there are corrective actions such as availability of life jacket, but the situation is much damaged. For the future, it is expented that the parties involved in sea transportation should optimize the supervision of the implementation of regulations that have been made, so as to minimize accidents in the middle of the sea.

Keywords: Supervision, Tourist Destination, Transportation

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Tanjungpinang dikenal sebagai Kota Budaya, Selain wisata pantai dan bahari, Kota Tanjungpinang juga memiliki objek wisata lainnya seperti cagar budaya, makam-makam bersejarah, tarian-tarian Tradisional serta *event-event* khas daerah. Di Kota Tanjungpinang terdapat Pulau Penyengat sebagai pulau bersejarah karena di pulau ini terdapat masjid bersejarah dan makam-makam Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji yang kedua-duanya adalah pahlawan nasional.

Salah satu keunikan dari Kota Tanjungpinang bahwa kota Tanjungpinang bukan hanya sebuah kota wisata saja tetapi disebut sebagai kota budaya, dimana di Kota Tanjungpinang tersebar cagar budaya yang diharapkan mampu menarik wisatawan. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU No.11 tahun 2010, pasal 1 ayat 1).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Novi Dwi Purwanti dan Retno Mustika Dewi (2014) menjelaskan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Untuk memperbesar pendapatan asli daerah maka pemerintah perlu mengembangkan dan memfasilitasi tempat pariwisata agar sektor pariwisata dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Perkembangan pariwisata berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, salah satu diantaranya adalah dampak pariwisata terhadap pendapatan pemerintah.

Kemudian dalam penelitian terdahulu Rentetadung (2012) pengaruh kunjungan wisatawan sangat berarti untuk pengembangan industri pariwisata dan pendapatan asli daerah sehingga wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara tertarik untuk berkunjung. Adanya dukungan alokasi dana dari pemerintah setiap tahunnya menjadikan sektor pariwisata mengembangkan tempat wisata agar banyak dikunjungi oleh wisatawan. Banyaknya wisatawan yang berkunjung menjadikan sektor pariwisata berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah.

Majunya sektor pariwisata disuatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang berkunjung. Kedatangan

wisatawan tersebut akan mendapatkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya. Bagi wisatawan mancanegara yang datang dari luar negeri, kedatangan mereka akan mendatangkan devisa dalam negara.

Penyengat adalah salah satu tempat di Kota Tanjungpinang yang memiliki tempat-tempat wisata yang banyak menyimpan sejarah dan budaya. Dengan adanya objek wisata sejarah di Tanjungpinang ini, maka secara tidak langsung memberi kontribusi atau peranan penting bagi pemerintah, daerah atau masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya.

Pulau Penyengat terkenal dengan sejarahnya dan banyaknya objek wisata sejarah yang dimiliki. Adapun persepsi dari beberapa wisatawan yang datang ke Pulau Penyengat untuk berkunjung ke situs-situs yakni Pulau Penyengat itu indah dan merupakan pulau religius, situs-situs untuk objek sejarahnya bagus.

Penyengat menyimpan banyak sejarah, terutama bagi perkembangan sejarah kerajaan melayu yang ada di Riau. Letaknya yang strategis untuk pertahanan negeri Riau, Pulau Penyengat telah berkali-kali menjadi medan pertempuran, termasuk perang Riau dengan Belanda. Benteng-benteng pertahanan yang bergaya ala Portugis masih dapat dilihat

hingga sekarang meskipun beberapa bentuknya tidak utuh.

Di Pulau Penyengat juga terdapat situs budaya rumah adat melayu Kepulauan Riau. Bangunan ini telah mengalami pemugaran. Bagian yang unik dari rumah adalah pada atap terdapat ornamen berbentuk tiang lurus yang dimaknai sebagai “alif” dalam agama islam.

Untuk mengelilingi Pulau Penyengat dapat dilakukan dengan berjalan kaki atau menggunakan fasilitas becak motor. Hanya dengan membayar sekitar 35 ribu rupiah, dapat berkeliling Pulau Penyengat untuk melihat situs sejarah dan sambil melihat kehidupan berbudaya masyarakat tempatan.

Untuk menuju ke pulau ini maka wisatawan harus menyeberang laut dari Kota Tanjungpinang melalui pompong dengan jarak tempuh \pm 15 menit. Selama ini kurangnya perhatian pemerintah khususnya Dinas Perhubungan terhadap sarana prasarana pariwisata seperti transportasi sesuai dengan Peraturan Menteri No. 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut. Permasalahan yang terjadi yaitu sebuah pompong yang berlayar dari pelabuhan Tanjungpinang ke Pulau Penyengat tenggelam, hal ini dikarenakan kurangnya kelengkapan keselamatan, pompong yang beroperasi masih belum memenuhi standar pelayaran, kurangnya pemahaman

“*tekong pompong*” terhadap cuaca dan pentingnya keselamatan penumpang.

Fenomena yang terjadi bahwa *tekong pompong* yang tenggelam di sekitar perairan Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Ibukota Kepulauan Riau, tidak menyediakan pelampung dan *pompong* belum sesuai dengan standar, kemudian kurangnya pemahaman *tekong pompong* dalam membaca cuaca. Sebuah kapal penyeberangan *pompong* dari Tanjungpinang ke Pulau Penyengat tenggelam.

Permasalahan yang baru saja terjadi adalah tenggelamnya *pompong* yang di nakhodai oleh Said Ismarullah (35 tahun), *pompong* tersebut membawa 17 orang yang terdiri atas 1 pengemudi, 2 penumpang anak-anak, dan 14 penumpang dewasa.

Kapal tersebut diduga tenggelam akibat diterpa angin kencang dan gelombang besar di perairan Penyengat, Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan tim SAR telah menghentikan pencarian korban tenggelamnya kapal penyeberangan *pompong* dari Tanjungpinang ke Pulau Penyengat. Pencarian tersebut dihentikan karena 17 penumpang kapal itu sudah ditemukan. (Sumber : Badan SAR Tanjungpinang, 22 Agustus 2016).

Selama ini *pompong* yang beroperasi tidak ada standar keselamatan sama sekalidalam beroperasi. Selain bermodal keberanian dari pengemudinya, tidak ada batas ketentuan maksimal muatan dan tidak ada pelampung. Praktis tidak ada pengawasan dan kehadiran pemerintah setempat. Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, praktis tidak bekerja dengan optimal melakukan pengawasan operasional *pompong*.

Permasalahan lainnya adalah tidak adanya asuransi selama pelayaran, baik itu untuk nakhoda *pompong* maupun bagi penumpang, selain itu tidak adanya *life jacket*, padahal Standar Operasional (SOP) sudah jelasyakni angkutan laut yang terbuka harus menggunakan *life jacket*. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri No. 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Angkutan Laut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya jenis dan mutu pelayaran yang berhak diperoleh oleh pengguna jasa angkutan laut. Standar pelayanan penumpang angkutan laut meliputi standar pelayanan angkutan laut di terminal dan standar pelayanan di atas kapal.

Standar pelayanan penumpang angkutan laut di atas kapal harus memenuhi persyaratan tersedianya informasi dan fasilitas keselamatan, informasi dan fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan dan ketertiban berupa sarana naik turun penumpang dari

kapal ke kapal, pos dan petugas keamanan, informasi gangguan keamanan serta peralatan dan pendukung keamanan.

Kemudian Dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2015 tentang standar keselamatan pelayaran meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, standar operasional prosedur (SOP), lingkungan serta sanksi.

Dari uraian latar belakang diatas penulis menarik kesimpulan untuk mengambil judul dalam penelitian ini yaitu **“Pengawasan Sistem Transportasi Laut Untuk Ke Daerah Destinasi Wisata Di Kota Tanjungpinang (Studi Terhadap Keamanan Transportasi Wisatawan Ke Pulau Penyengat)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Pengawasan Sistem Transportasi Laut Untuk Ke Daerah Destinasi Wisata Di Kota Tanjungpinang Dalam Keamanan Transportasi Wisatawan Ke Pulau Penyengat?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah Untuk Mengetahui Pengawasan Sistem Transportasi Laut Untuk Ke Daerah Destinasi Wisata Di Kota Tanjungpinang Dalam Keamanan Transportasi Wisatawan Ke Pulau Penyengat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penerapan ilmu yang telah peneliti pelajari khususnya dibidang Ilmu Administrasi Negara yang erat kaitannya dengan fungsi organik manajemen yaitu fungsi pengawasan
- b. Bahan masukan bagi Pemerintah dalam hal meningkatkan pengawasan
- c. Bahan masukan dan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama

D. Konsep Operasional

Manullang (2004:184) untuk mempermudah dalam merealisasi tujuan, pengawasan harus perlu dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan yang terdiri dari :

- a. Menetapkan Alat Ukur (*Standard*). Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilai itu diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilai itu harus dikemukakan, dijelaskan kepada bawahan. Dengan demikian atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi

standar hasil pekerjaan bawahan tersebut.

- b. Mengadakan Penilaian (*Evaluate*). Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Jadi pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidak adanya penyimpangan.
- c. Mengadakan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action*). Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang menyesuaikan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan perbaikan itu tidak serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar. Oleh karena itulah, perlu sekali adanya laporan-laporan berkala sehingga segera sebelum terlambat dapat diketahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan, serta dengan tindakan perbaikan yang akan diambil, pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dapat diselamatkan sesuai dengan rencana.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat

perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Penelitian ini dilakukan karena dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Peneliti dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta yang sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian yaitu Pengawasan Sistem Transportasi Laut Untuk Ke Daerah Destinasi Wisata Di Kota Tanjungpinang Dalam Keamanan Transportasi Wisatawan Ke Pulau Penyengat. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana kualitatif merupakan data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka (Moleong, 2011:11).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu dengan melakukan terlebih dahulu mendeskripsikan, memverifikasi, menginterpretasikan untuk kemudian dianalisis sehingga memperoleh suatu kesimpulan. Moleong (2011:35) menyatakan analisa dan kualitatif adalah proses pengorganisasian, dan pemilahan data kedalam pola dan kategori serta satu uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema yang seperti disarankan oleh data. Adapun langkah – langkah analisa data yang dilakukan adalah : (1) menelaah dari semua data yang tersedia dari berbagai sumber, (2) reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi, (3) menyusun data kedalam satuan-satuan, (4) pengkategorian data sambil membuat koding, (5) mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dan (6) penafsiran data secara deskripsi

II. LANDASAN TEORI

1. Penelitian Terdahulu

- a. Berdasarkan penelitian Mudana (2014) tentang Peningkatan Pengawasan Keselamatan Angkutan Penyeberangan Lintas Palembang-Muntok menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan dan investigasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk dapat dipertimbangkan sebagai tulang punggung keselamatan angkutan penyeberangan. Dalam laporan tersebut yang dominan adalah kecelakaan dan insiden. Berbagai kepentingan diobservasi untuk memperkaya prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan. Indikator kinerja keselamatan perlu dikembangkan karena dapat dijadikan sebagai perbandingan dengan moda lain, sehingga memudahkan untuk mencapai tingkat keselamatan yang lebih baik serta mudah memahami akibat kecelakaan. Dengan demikian, penyelenggara angkutan penyeberangan dapat melakukan yang terbaik dalam pengambilan keputusan.
- b. Suparmin (2016) dalam penelitiannya yaitu fungsi pengawasan dalam meningkatkan keselamatan penumpang angkutan penyeberangan kapal ferry tradisional di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan dalam meningkatkan keselamatan penumpang angkutan penyeberangan kapal ferry tradisional, Dinas Perhubungan sudah memaksimalkan pengawasannya di setiap pelabuhan yang mengadakan aktifitas penyeberangan. Dengan cara mengadakan inspeksi langsung, melakukan observasi ditempat, dan laporan ditempat. Inspeksi langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan hampir dilaksanakan setiap hari yaitu dengan di bantu oleh petugas lapangan dan staf-staf lainnya yang tergabung dalam sebuah tim yang ada di Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara.
- c. Penelitian terdahulu selanjutnya adalah menurut Muhammad Syabranie, dan Raja

Jusmartinah (2013) tentang Upaya Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Bulungan menjelaskan bahwa secara umum upaya yang telah dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Bulungan belum optimal. Dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Bulungan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan menghadapi beberapa kendala yaitu kuantitas dan kualitas yang belum memadai mengenai sumber daya manusianya, sarana dan prasarana ke tempat obyek wisata masih minim, dan kondisi jalan ke lokasi wisata yang kurang terawat.

Di samping itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga memiliki faktor pendukung yang dapat menunjang pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Bulungan yaitu keaslian objek wisata alam, budaya dan kesenian tradisional yang merupakan produk wisata daerah, dan keuangan yang dimiliki relatif cukup memadai.

Berdasarkan analisis SWOT maka dapat ditentukan pemecahan masalah yaitu mengembangkan potensi objek wisata yang belum tergali dengan memanfaatkan dana yang tersedia, memberdayakan masyarakat di sekitar objek wisata, meningkatkan pembinaan seni budaya daerah, melakukan koordinasi yang baik dengan lintas sektor agar pembangunan sarana dan prasarana dapat diwujudkan, melakukan kerjasama dengan sektor swasta untuk mengadakan biro perjalanan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

d. penelitian oleh I G.A. Anom Yudistira dan Nur Agus Susanto (2012) tentang Rancangan Sistem Penilaian Pengunjung Tempat Wisata dijelaskan bahwa kecelakaan yang terjadi di tempat wisata menimbulkan kerugian bersifat materi dan immateriil kepada pengelola dan pengunjung yang merupakan korban. Pengelola mengalami dua kerugian sekaligus yaitu mengganti kerugian kepada korban

dengan sejumlah uang yang sudah ditentukan, dan kerugian bersifat immateriil yaitu reputasi. Kerugian immateriil bersifat jangka panjang yaitu kelangsungan tempat wisata untuk kembali memulihkan *image* positif sehingga pengunjung akan melupakan kejadian tersebut.

Dari sejumlah kajian terdahulu diatas, yang berbeda dari kajian peneliti adalah keamanan transportasi laut untuk tujuan kawasan destinasi wisata merupakan fokus penting karena potensi pemanfaatannya lebih tinggi frekuensinya dibandingkan kawasan pulau bermukim, sehingga resiko bahaya bagi penumpang lebih besar.

2. Pengawasan

Bagir Manan memandang *control* sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut sebagai fungsi kontrol atau pengendalian (Bagir Manan, 2000:1-2). Dalam pelaksanaan tugas pengawasan tahapan-tahapan pada fungsi manajemen memiliki keterkaitan satu samalain. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan

urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (Siswanto Sunarno, 2005:97).

Pengertian pengawasan menurut Ndraha (2003:201) adalah sebagai berikut pengawasan diartikan sebagai pengawasan sebelum sepanjang dan sesudah sesuatu terjadi maka dari pada itu dikenal dengan pengawasan dengan namanya pengawasan preventif dan pengawasan represif (koreksi) berarti pengawasan dapat di artikan sebagai *control* yang akan dilakukan.

Menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007:44) menyatakan Pengawasan dilihat dari metodenya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya. 2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD.

Menurut Siagian (2008: 258) definisi yang diberikan kepada pengawasan adalah “keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan sebelumnya, selanjutnya menurut Gitosudarmo dan Mulyono (2001:154) pengawasan merupakan suatu rangkaian proses kegiatan dalam manajemen untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.

Dale (dalam Winardi 2000:224) mengatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Menurut Saiful Anwar (2004 : 127), pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparat pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

Pengawasan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh seseorang dalam bentuk pelayanan suatu urusan yang dapat memberikan kontribusi pada prestasi kerja pada petugas pelabuhan apa yang telah dilayaninya.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen, di mana pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan

seluruh proses organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan di dalam organisasi.

Secara filosofis, pentingnya pengawasan berangkat dari kenyataan bahwa manusia penyelenggara kegiatan operasional merupakan makhluk yang tidak sempurna dan memiliki keterbatasan, baik kemampuan, pengetahuan maupun keterampilan. Menurut Duncan, sebagaimana dikutip Harahap (2004:48) beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut :

1. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya, Oleh karena itu harus dikomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat
2. Pengawasan harus mengikuti pola dan situasi yang dianut atau dimiliki oleh organisasi
3. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi organisasi
4. Pengawasan harus fleksibel tidak kaku
5. Pengawasan harus memperhatikan aspek ekonomis, *cost benefit*-nya

Untuk mengetahui proses pengawasan dengan mempergunakan kerangka teori menurut Handoko (2003:363) yang mengemukakan bahwa proses “pengawasan terdiri dari lima tahap, diantaranya ialah :

- a. Penetapan standar pelaksanaan pengawasan
- b. Menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan
- d. Perbandingan pelaksanaan pengawasan dengan standar dan analisa penyimpangan, atau membandingkan hasil pelaksanaan pengawasan dengan dasar (standar yang direncanakan/yang telah ditetapkan)
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan ketika hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan harus diambil, menerima hasil atau menolak hasil yang dicapai melalui tindakan yang telah dilakukan

Menurut Manullang (2004:184) untuk mempermudah dalam merealisasi tujuan, pengawasan harus perlu dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan yang terdiri dari :

1. Menetapkan Alat Ukur (*Standard*)

Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilai itu diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilai itu harus dikemukakan, dijelaskan kepada bawahan. Dengan demikian atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan tersebut.

2. Mengadakan Penilaian (*Evaluate*)

Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Jadi pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidak adanya penyimpangan.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action*)

Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang menyesuaikan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan perbaikan itu tidak serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar. Oleh karena itulah, perlu sekali adanya laporan-laporan berkala sehingga segera sebelum terlambat dapat diketahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan, serta dengan tindakan perbaikan yang akan diambil, pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dapat diselamatkan sesuai dengan rencana.

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.

Menurut Saiful Anwar (2004:127) menjelaskan bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah

ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan - penyimpangan.

Menurut Harold Koontz (Brantas, 2009:189) bahwa “pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.”

Kemudian menurut Maman Ukas (2006:343) menyatakan bahwa Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi maka pengawasan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan ketika terjadi penyimpangan dapat langsung mengambil tindakan sebagai suatu koreksi.

Karena pengawasan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi maka ada beberapa tujuan pengawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pengawasan seperti yang dikatakan Soekarno (Gouzali Saydam, 2000:197) tujuan pengawasan adalah:

1. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi
2. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana
3. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien
4. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan
5. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan

Adapun tujuan pengawasan menurut I.G. Wursanto (2005:158) adalah sebagai berikut:

1. Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kemacetan sebelum kemacetan itu timbul
2. Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang timbul
3. Mencegah penyimpangan-penyimpangan
4. Mendidik pegawai untuk mempertebal tanggung jawab
5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang timbul
6. Mendapat efisiensi dan efektivitas

Menurut Suriansyah Murhaini (2014:4) pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah di selenggarakan secara

berkelanjutan. Pada dimensi ini, ada ukuran yang telah dicapai dan menjadi dasar untuk langkah selanjutnya. Dalam hal ini penilaian atau evaluasi dilaksanakan secara terukur, dengan kuantitas yang jelas baik pencapaian maupun target yang diinginkan. Dalam pengawasan terkandung keharusan untuk secara kongkrit menemukan hambatan apa yang terjadi. Berikutnya tentu saja menemukan solusi yang tepat.

Pengawasan menurut Terry dan Leslie (2005:232) menjelaskan bahwa seorang manajermengelola agar tercapai hasil-hasil yang diinginkan atau direncanakan. Keberhasilan atau kegagalan yang disajikan hasil-hasil ini dipertimbangkan dari segi tujuan yang sudah ditentukan. Hal ini mencakup pengawasan yaitu mengevaluasi pelaksanaan kerja, dan jika perlu memperbaiki apa yang sedang dikerjakan untuk menjamin tercapainya hasil-hasil menurut rencana.

Berdasarkan pendapat Terry dan Leslie (2005:242) menjelaskan bahwa pengawasan berkaitan dengan mengetahui apa yang sedang terjadi dibandingkan dengan apa yang direncanakan. Agar seorang manajer tetap mengetahui lebih dahulu apa yang terjadi, maka biasanya adalah perlu untuk melakukan pengawasan-pengawasan di bidang kunci tertentu, bidang kunci tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan kuantitas adalah pengawasan yang dimaksudkan

- untuk menimbulkan arus hasil-hasil produksi yang diinginkan secara teratur atau jasa-jasa. Maksud pengawasan kuantitas adalah untuk terus memperhatikan bagaimana caranya berbagi hasil-hasil produksi atau jasa-jasa itu bergerak
2. Pengawasan kualitas dimaksudkan untuk mempertahankan kualitas yang memuaskan untuk tujuan yang dimaksudkan bukan untuk kualitas setinggi mungkin
 3. Pengawasan waktu adalah pengawasan yang menggunakan waktu dengan efektif, manajer berada di bawah penekanan untuk mengurangi waktu yang dipakai untuk membaca material. Waktu adalah suatu sumber yang terbatas
 4. Pengawasan biaya adalah pertimbangan dalam hampir semua kegiatan. Kebanyakan biaya dapat dikategorikan dalam salah satu dari 5 kategori umum yaitu biaya langsung, biaya material langsung, biaya tata usaha, biaya ongkos jualan, dan ongkos administrasi

Kemudian menurut Terry dan Leslie (2005:259) dijelaskan bahwa dalam pengawasan ada yang disebut pengawasan menyeluruh. Pengawasan menyeluruh berlaku terhadap seluruh organisasi atau sebagian besar dan tidak terbatas sampai pada kegiatan tertentu saja. Pengawasan-pengawasan ini memberikan suatu cara untuk :

1. Mengukur performan dari keseluruhan organisasi dan bukan dari suatu bagian saja
2. Menjamin bahwa performan keseluruhannya adalah konsisten dengan rencana keseluruhannya
3. Mengawasi unit-unit yang semi otonom

III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pulau Penyengat adalah sebuah pulau kecil yang terletak di seberang Tanjungpinang sekitar 5,5 km. Pulau ini berukuran panjang 2.000 meter dan lebar 850 meter, berjarak lebih kurang 35 km dari Pulau Batam. Pulau ini dapat ditempuh dari Tanjungpinang dengan menggunakan perahu bermotor atau lebih dikenal pompong yang memerlukan waktu tempuh kurang lebih 15 menit. Penyengat keseluruhan beriklim tropis dengan temperatur 23 °C – 34 °C. Tekanan udaranya berkisar antara 1.010,2 mbs dan 1.013,7 mbs. Secara resmi memiliki musim kemarau dan musim penghujan. Tidak ada perbedaan musim yang mencolok di daerah ini. Hujan dapat turun sepanjang tahun. Namun, setiap akhir tahun sampai dengan awal tahun terjadi "Angin Utara" yang sangat berbahaya dengan gelombang yang sangat kuat.

Pulau Penyengat memiliki berbagai macam peninggalan bersejarah seperti makam-makam para raja seperti Raja Ali Haji, Mesjid Raya Sultan Riau yang terbuat dari putih telur sebagai perekat bangunan dan benteng pertahanan di Bukit Kursi. Di dalam Mesjid Raya Sultan Riau, terdapat dua buah Al-Quran tulisan tangan yang berusia 150 tahun dan memiliki ukuran

yang lebih besar. Melihat dari aspek sejarah yang telah diuraikan tersebut diatas, bahwa Pulau Penyengat merupakan daerah yang banyak menyimpan peninggalan sejarah budaya yang tidak terlupakan. Hal tersebut masih dapat kita lihat pada saat ini dengan melihat peninggalan situs – situs yang ada serta benda – benda bersejarah lainnya. Dalam kehidupan masyarakat Pulau Penyengat masih diwarnai dengan kehidupan budaya Melayu. Sisi kehidupan yang diwarnai oleh kebudayaan Melayu tersebut dapat dilihat pada kekerabatan yang masih melekat pada masyarakat Pulau Penyengat itu sendiri. Berikut beberapa tempat wisata yang ada di Pulau Penyengat :

1. Masjid Raya Sultan Riau

Masjid ini awalnya dibangun oleh Sultan Mahmud pada tahun 1803. Kemudian pada masa pemerintahan Yang Dipertuan Muda VII Raja Abdurrahman, tahun 1832 masjid ini direnovasi dalam bentuk yang terlihat saat ini. Bangunan utama masjid ini berukuran 18 x 20 meter yang ditopang oleh 4 buah tiang beton. Di keempat sudut bangunan, terdapat menara tempat Bilal mengumandangkan adzan.

Pada bangunan Masjid Sultan Riau terdapat 13 kubah yang berbentuk seperti bawang. Jumlah keseluruhan menara dan kubah di Masjid Sultan Riau sebanyak 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat salat wajib lima waktu sehari semalam. Di sisi kiri dan kanan bagian depan masjid terdapat bangunan tambahan yang disebut dengan Rumah Sotoh (tempat

pertemuan). Menurut sejarahnya, masjid ini dibangun dengan menggunakan campuran putih telur, kapur, pasir dan tanah liat. Terdapat dua buah al-Quran tulisan tangan yang tersimpan di dalam Masjid Sultan Riau Pulau Penyengat. Salah satu yang diperlihatkan kepada pengunjung adalah hasil goresan tangan Abdurrahman Stambul, seorang penduduk Pulau Penyengat yang dikirim oleh Kerajaan Lingga ke Mesir untuk memperdalam ilmu Agama Islam, sekembalinya dari belajar dia menjadi guru dan terkenal dengan "khat" gaya Istanbul. Al-Quran ini diselesaikan pada tahun 1867 sambil mengajar. Keistimewaan al-Quran Mushaf Abdurrahman Stambul ini adalah banyaknya penggunaan "Ya Busra" serta beberapa rumah huruf yang titiknya sengaja disamakan sehingga membacanya cenderung berdasarkan interpretasi individu sesuai akal dan ilmunya.

2. Istana Kantor

Istana Kantor adalah istana dari Yang Dipertuan Muda Riau VIII Raja Ali (1844-1857), atau juga yang disebut dengan Marhum Kantor. Selain digunakan sebagai kediaman, bangunan yang dibangun pada tahun 1844 ini juga difungsikan sebagai kantor oleh Raja Ali. Istana Kantor berukuran sekitar 110 m2 dan menempati areal sekitar satu hektar yang seluruhnya dikelilingi tembok. Bangunan dan puing yang masih ada memperlihatkan kemegahannya pada masa lalu.

3. Balai Adat Melayu

Balai Adat Pulau Penyengat adalah replika rumah adat Melayu yang pernah ada di Pulau Penyengat. Bangunan Balai Adat merupakan rumah panggung khas Melayu yang terbuat dari kayu. Balai Adat difungsikan untuk menyambut tamu atau mengadakan perjamuan bagi orang-orang penting. Di dalam gedung, kita dapat melihat tata ruang dan beberapa benda perlengkapan adat resam Melayu, serta berbagai perlengkapan atraksi kesenian yang digunakan untuk menjamu tamu-tamu tertentu. Di bagian bawah Balai Adat ini terdapat sumur air tawar yang konon sudah berabad lamanya dan sampai sekarang airnya masih mengalir dan dapat langsung diminum.

4. Monumen Bahasa Melayu

Pada tanggal 19 Agustus 2013, telah diletakkan batu pertama pembangunan Monumen Bahasa Melayu di areal dalam bekas Benteng Kursi, Pulau Penyengat, oleh Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani. Pembangunan monumen ini merupakan wujud penghormatan dan penghargaan Pemerintah Provinsi Kepri terhadap jasa-jasa Raja Ali Haji sebagai pahlawan nasional di bidang bahasa. Selain itu juga untuk lebih mengenalkan tentang asal dan arti bahasa Melayu yang dipakai di Kepulauan Riau dan Lingga,

serta bahasa Indonesia yang digunakan saat ini

5. Kompleks Makam Raja Ali Haji

Makam Raja Ali Haji dikenal sebagai salah satu pahlawan Kepulauan Riau atas karya sastranya. Ia menciptakan gurindam dua belas yang hingga kini melekat pada budaya melayu di Riau

6. Ziarah di Kompleks Makam Engku Puteri Raja Hamidah

Tidak terlalu jauh dari masjid, terdapat kompleks makam yang memiliki struktur atap bersusun dengan ornamen yang indah. Di kompleks makam ini terdapat beberapa makam pembesar kerajaan Riau, salah satu diantaranya adalah makam Engku Puteri.

Engku Puteri yang memiliki nama lahir Raja Hamidah merupakan anak dari Raja Haji Yang Dipertuan Muda Riau ke IV. Sejarahnya, perkawinan dengan Sultan Mahmud mengantar Engku Puteri Raja Hamidah menjadi tokoh yang sangat penting dalam kerajaan Riau-Johor pada awal abad ke-19. Karena di dalam tangannya diamanahkan alat-alat kebesaran kerajaan (insignia atau *rgelia*).

Tanpa alat-alat kebesaran itu penobatan seorang sultan menjadi tidak sah menurut adat setempat. Konon, pulau Pengengat adalah mas kawin dari Sultan Mahmud

kepada Engku Puteri. Berdasarkan catatan sejarah, Engku Puteri wafat pada tahun 1844. Selain makam Engku Puteri juga terdapat makam Raja Haji Abdullah Yang Dipertuan Muda Riau IX, dan makam Raja Ali Haji Sastrawan dari kerajaan Riau Lingga, karyanya yang terkenal adalah Gurindam Dua Belas.

7. Komplek Makam Raja Jakfar

Komplek makam Raja Jakfar adalah kompleks makam yang baik diantara makam lainnya. Dilapisi dinding dengan pilar dan kubah kecil disamping terdapat kolam tempat berwudhu untuk sholat. Raja Jakfar adalah anak Raja Haji Fisabilillah, merupakan Yang Dipertuan Muda Riau VI. Pada masa pemerintahannya Raja Jakfar memindahkan pusat kerajaan yang tadinya di hulu Riau ke pulau Penyengat.

Raja Jakfar memulai karirnya sebagai pengusaha pertambangan timah yang sukses di Kelang, Selangor. Karena sering mengunjungi kota melaka beliau menjadi peka akan penataan kota dengan arsitektur yang sejalan dengan zaman. Karena itulah pulau Penyengat ditata dan dikelolanya dengan selera yang tinggi. Dalam kompleks makam Raja Jakfar juga terdapat makam Raja Ali Yang Dipertuan Muda VIII kerajaan Riau anak dari Raja Jakfar. Raja Ali merupakan figure yang taat beribadah. Pada masa

pemerintahannya ia membuat kebijakan untuk mewajibkan kaum laki-laki melaksanakan sholat jumat dan mewajibkan kaum wanita untuk menggunakan busana muslimah.

IV. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

1. Menetapkan Alat Ukur (*Standard*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka diketahui bahwa untuk pengawasan sendiri sudah memiliki aturannya. Syahbandar memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang pembagian kewenangan namun tidak hanya itu ada aturan lainnya seperti Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan dan Peraturan Menteri No. 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut. Kedua Peraturan Menteri tersebut merupakan upaya Kementerian Perhubungan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi pengguna moda transportasi laut, dalam Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2015 tentang standar keselamatan pelayaran meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan/ prasarana, standar operasional prosedur (SOP), lingkungan serta sanksi.

Namun hal ini bertolak belakang dengan hasil observasi yang ditemukan bahwa Syahbandar tidak selalu ada mengawasi dan turun ke laut untuk melakukan pengawasan langsung. Bahkan kadang yang terjadi adalah para

tekong kapal terlambat untuk mendapatkan informasi cuaca.

2. Mengadakan Penilaian (*Evaluate*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa setelah terjadi kejadian tenggelamnya pompong di Pulau Penyengat instansi terkait khususnya pemerintah melakukan penilaian di lapangan dan menyesuaikan antara aturan yang berlaku dengan apa yang ada di lapangan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajerial setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan.

Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan berdampak lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Maman Ukas (2006:343) menyatakan bahwa Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pada pelaksanaannya pengawasan dilakukan oleh seorang pengawas, yang memiliki kompetensi pengawasan sesuai dengan tugas dan regulasi yang mengatur tentang fungsi dan tugas pengawas.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

(*Corrective Action*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan diketahui bahwa saat ini tindakan perbaikan memang sudah dilakukan walaupun di rasakan masyarakat belum optimal karena masih banyak yang tidak sesuai dengan standarisasinya, pengawasan sangat di butuhkan agar menciptakan rasa aman bagi para wisatawan untuk melakukan perjalanan ke pulau Penyengat. Fungsi pengawasan itu sendiri adalah suatu fungsi dimana tindakan atau proses kegiatan itu dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kesalahan, kegagalan, untuk kemudian dilakukan perbaikan dan menjaga agar pelaksanaan berbeda dengan rencana yang ditetapkan.

Namun sebaliknya, sebaik apapun rencana yang telah ditetapkan, juga tetap memerlukan pengawasan hal ini di dukung oleh pendapat Terry (2006) menjelaskan bahwa fungsi pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila mana perlu melakukan perbaikanperbaikan sehingga sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar". Walaupun dalam kenyataannya masih banyak yang harus di perbaiki seperti *life jacket* yang cukup dan layak, pompong yang layak kemudian informasi cuaca yang diberikan cepat, kemudian kelayakan dermaga, dan kepatuhan tekong pompong. Hal ini tentu harus menjadi poin penting bagi tindakan perbaikan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Sistem Transportasi Laut Untuk Ke Daerah Destinasi Wisata Di Kota Tanjungpinang (Studi Terhadap Keamanan Transportasi Wisatawan Ke Pulau Penyengat) belum dilakukan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari:

1. Menetapkan alat ukur (*Standard*) ditemukan bahwa Syahbandar memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang pembagian kewenangan namun tidak hanya itu ada aturan lainnya seperti Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan dan Peraturan Menteri No. 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut. Namun berdasarkan data yang ada di lapangan tidak memiliki kesamaan dengan data yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, dari 62 pompong yang beroperasi, hanya 24 pompong yang terdata dan dianggap layak untuk beroperasi, sehingga ada sekitar 38 pompong yang belum masuk dalam pendataan karena belum memenuhi standar namun bisa beroperasi.
2. Mengadakan Penilaian (*Evaluate*) ditemukan bahwa setelah terjadi kejadian tenggelamnya pompong di

Pulau Penyengat instansi terkait melakukan penilaian dilapangan seperti pemakaian *life jacket*.

Namun, untuk kepemilikan surat izin pompong, masih banyak pompong yang tidak bersertifikat tetapi dapat beroperasi secara bebas.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action*) ditemukan bahwa Pemerintah dan OPPM (Organisasi Penambang Perahu Motor) membentuk Koperasi Nakhoda Bahtera Penyengat pada tanggal 19 September 2016 bekerjasama dengan PT. Jasa Raharja untuk memberikan santunan jaminan keselamatan. Kemudian pemerintah juga memberikan bantuan berupa *life jacket* dan lampu navigasi untuk berlayar saat malam hari kepada semua pompong Penyengat. Saat ini tindakan perbaikan memang sudah dilakukan walaupun dirasakan masyarakat belum optimal karena masih banyak yang tidak sesuai dengan standarisasinya, masih banyak yang harus dibenahi dan harus ada pengawasan yang ketat, karena masih banyak pompong yang beroperasi tidak dilengkapi dengan alat-alat keselamatan yang layak seperti saat ini memang sudah ada *life jacket*. Namun, keadaannya banyak yang rusak, begitu juga dengan pompong yang perlu ada peremajaan sehingga lebih aman.
4. Saat ini upaya dilakukan pemerintah dengan

mengaktifkan *collaborative governance*, dimana dalam pengawasan pemerintah juga mengharapkan adanya kerjasama berbagai instansi pemerintah, pihak tekong pompong dan masyarakat, kerjasama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama yang intensif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk memastikan pompong yang jalan aman untuk wisatawan

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah pemerintah daerah diharapkan mampu membangun posko untuk meletakkan *life jacket* dengan 2 orang penjaga sehingga penumpang dapat menggunakan *life jacket* secara tertib.

Agar pengawasan dilakukan secara optimal guna keselamatan keamanan pengguna jasa transportasi laut berupa pompong, saran secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Harus dilakukannya pengawasan secara rutin dan berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Dishub, Syahbandar, dan Pol air agar permasalahan tidak terjadi lagi dengan cara memeriksa standarisasi kelayakan pompong. Untuk Syahbandar seharusnya terus menerus memberikan informasi cuaca dengan cepat sehingga meminimalisir kejadian di tengah laut.
2. Dinas perhubungan harus memberikan pemahaman kepada tekong pompong tentang peraturan yang berlaku mengenai keselamatan

pelayaran, seperti memeriksa surat izin berlayar pompong di lapangan, jika tidak memiliki surat izin berlayar maka dengan tegas pompong tidak boleh beroperasi dan menarik penumpang.

3. Pemerintah bisa melakukan sosialisasi dan memberikan bantuan tambahan berupa *life jacket* untuk keselamatan dan keamanan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Saiful, 2004. Seni.idi-Sendi Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Glora Madani Press.

Atik & Ratminto. 2012. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Bagir.Manan, 2000.Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Dessler Gary, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Indeks

Ernie dan Saefullah, Kurniawan. 2005. Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana.

Gouzali Saydam, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource) Suatu Pendekatan Mikro, Djanbatan, Jakarta

Gie, The Liang 2000. Administrasi Perkantoran. Yogyakarta : Modern Liberty.

Gibson dan Ivencevich.2005.Organisasi Edisi Kelima. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama

Gitosudarmo, Drs.Indriyo dan Mulyono, Drs. Agus. 2001. Prinsip Dasar Manajemen Edisi 3. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta

Handoko, Hani. 2003. Manajemen. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Harahap, Sofyan S. 2004. Management Control System (Sistem Pengawasan Manajemen). Jakarta: Pustaka Quantum.

Hasibuan, Malayu S.P. 2009. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara

Kusmayadi dan Sugiarto, Endar. 2000, Metode Penelitian dalam Bidang Kepariwisata. Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama.

Manullang, M. 2004. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Maman Ukas, 2006, Manajemen. Cetakan keenam Edisi Revisi. Bandung: Penerbit Aghini.

Mathis, Robert L. dan John H. Jackson. 2006. Manajemen Sumber Daya

Manusia Jilid 2. Jakarta: Grafindo.

Maringan Masry, 2004. Dasar-dasar dan Administrasi Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Murhaini, Suriansyah. 2014. Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Purnamawati dan Eldarni. 2001. Media Pembelajaran. Jakarta: CV. Rajawali.

- Raharjo.2011.Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Robbins SP, dan Judge. 2002. Perilaku Organisasi Buku 2.Jakarta : Salemba. Jurnal
- Safroni, Ladzi. 2012. Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia. Surabaya: Aditya Media Publishing
- Siagian, Sondang. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia (cetakan 15). Jakarta: Bumi Aksara
- Siswanto Sunarno, 2005, Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: CV.Alfabeta
- Theresia Damayanti. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W. 2005.Dasar – Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wursanto. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta: Andi.
- Dewi. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi colaborative governance dalam pengembangan industri kecil. TESIS. Universitas Sebelas Maret. <https://digilib.uns.ac.id>
- I G.A. Anom Yudistira dan Nur Agus Susanto. 2012. Rancangan Sistem Penilaian Keselamatan Pengunjung Tempat Wisata. <http://download.portalgaruda.org>
- I Ketut Mudana (2014) tentang Peningkatan Pengawasan Keselamatan Angkutan Penyeberangan Lintas Palembang-Muntok.Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTransLog) - Vol. 01 No. 03, November 2014
- Muhammad Syabranie, Raja Jusmartinah. 2013. Upaya Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Bulungan. Jurnal Teknik. Volume 11 Nomor 01 – Januari 2013 – ISSN.
- Novi Dwi Purwanti, Retno Mustika Dewi. 2014. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto. Tahun 2006-2013. Jurnal Ekonomi. Vol 2 No 3

Nurwahida. 2003. Persepsi Pengambilan Keputusan Terhadap Implementasi Standar Manajemen Keselamatan Kapal-kapal Pelayaran Rakyat. Tesis Magister, Program Pasca Sarjana UNHAS, Makassar

Rantetadung, M. 2012. Analisis Pengaruh Dukungan Pemerintah dan Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Nabire. *Jurnal Agroforensi*. 7 (1), 25-32

Suparmin. 2016. fungsi pengawasan dalam meningkatkan keselamatan penumpang angkutan penyeberangan kapal ferry tradisional di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Sosiatri- Sosiologi* 2016, 4, (1): 126-140 ISSN 0000-0000, ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id

Swastini. 2010. Collaborative Governance Komisi Penanggulangan AIDS dan Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal Dalam Kasus HIV/AIDS Di Kota Surakarta. <https://eprints.uns.ac.id>

Thompson, Perry and Miller. 2007. Conceptualizing and Measuring Collaboration. *Public Administration Research and Theory Advance Access*. published Local Government Studies. 38 (2). 161 - 181.